

BAB I

PENDAHULUAN

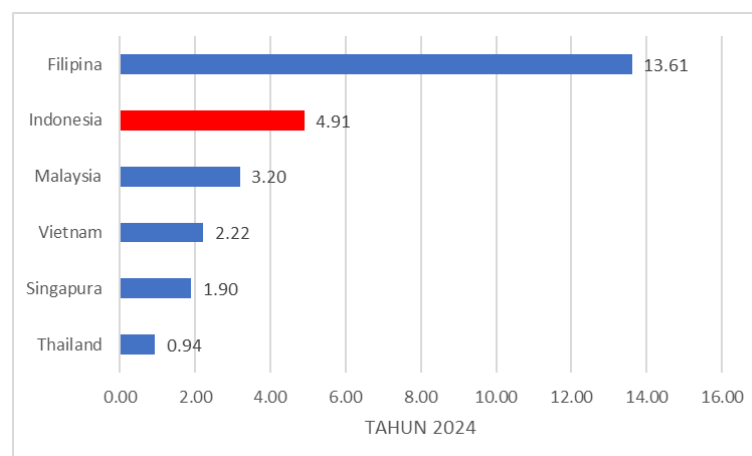
1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah permasalahan global yang kompleks dan multidimensi, mempengaruhi jutaan individu di berbagai negara, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, mengakibatkan konsekuensi negatif seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semua negara, baik maju maupun berkembang, menghadapi masalah kemiskinan (Suharianto & Lubis, 2022).

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan pengeluaran, mencerminkan realitas yang kompleks dan beragam, melampaui sekadar kekurangan materi dan mencakup aspek sosial serta ekonomi yang saling berkaitan (Mahendra & Juandi, 2024). Kemudian sebagai kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan (Muhammad Abram, et al, 2021). Pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk keberlanjutan hidup manusia. Untuk itu menekankan agar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang layak,

menunjukkan pentingnya mengatasi kemiskinan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan (Mohini, 2022).

Kemiskinan merupakan kendala yang sering muncul dan tidak pernah absen sepanjang sejarah, sehingga berbagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya diimplementasikan dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memiliki cara dan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penting untuk menganalisis data terkini yang menggambarkan kondisi kemiskinan di kawasan ASEAN. Data ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi juga memungkinkan perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan. Berikut ini disajikan perbandingan persentase kemiskinan di enam negara ASEAN pada tahun 2024.



Sumber: Ceicdata.com, data diolah kembali, (2025)

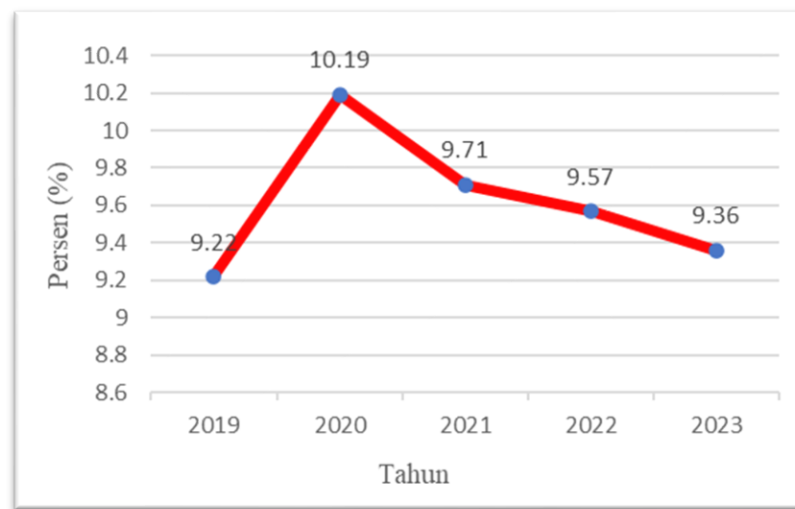
Gambar 1.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di ASEAN Tahun 2024 (%)

Berdasarkan gambar di atas, terungkap fenomena paradoksal yang mengejutkan dalam konteks kemiskinan di ASEAN tahun 2024. Indonesia, dengan status ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan PDB mencapai 1,32 triliun dolar AS, justru menduduki posisi kedua tertinggi dalam tingkat kemiskinan (4,91%), jauh di atas negara-negara tetangga seperti Vietnam (2,22%) yang memiliki PDB per kapita lebih rendah. Yang lebih mencengangkan, Thailand dengan tingkat kemiskinan hanya 0,94% - hampir 1/5 dari Indonesia - memiliki struktur ekonomi yang tidak jauh berbeda. Fenomena ini menghadirkan "Paradoks Pertumbuhan Tanpa Pemerataan" yang kontradiktif, di mana Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif selama dua dekade terakhir namun gagal mentransformasikan pertumbuhan tersebut menjadi pengentasan kemiskinan yang signifikan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sementara negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan korelasi kuat antara investasi sosial dan penurunan kemiskinan, Indonesia memperlihatkan anomali statistik yang mengkhawatirkan. Paradoks ini menggambarkan kegagalan struktural dalam model pembangunan Indonesia yang masih bertumpu pada sektor ekstraktif dan padat modal, bukan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Fenomena "*high-cost, low-impact*" ini mempertanyakan secara fundamental efektivitas dan keberlanjutan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini diterapkan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kemiskinan di Indonesia, penting untuk menganalisis grafik yang menunjukkan tren tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir. Grafik ini mencerminkan fluktuasi

angka kemiskinan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial. Dengan memahami tren ini, kita dapat mengidentifikasi periode-periode di mana kemiskinan mengalami penurunan atau peningkatan, serta mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah kembali, 2025

Gambar 1. 2

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2023 Persen (%)

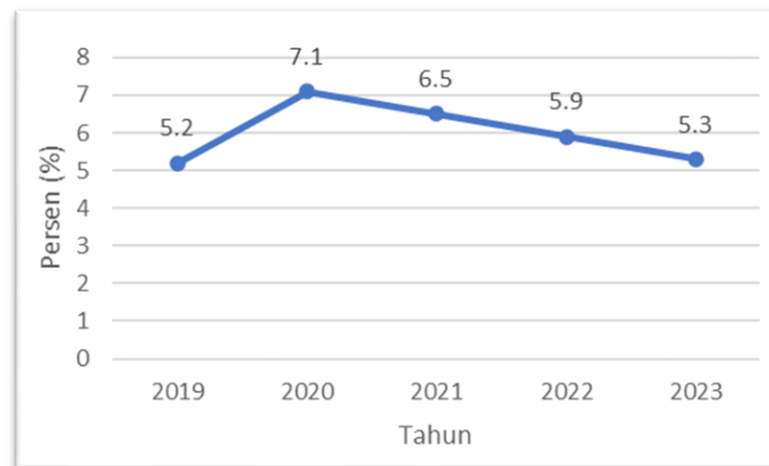
Grafik tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya perubahan yang dipengaruhi kondisi ekonomi. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,22% kemudian melonjak tajam menjadi 10,19% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi lapangan pekerjaan. Selanjutnya, angka kemiskinan menurun menjadi 9,71% pada tahun 2021, lalu turun lagi menjadi 9,57% pada tahun 2022 seiring pemulihan ekonomi yang mulai terjadi. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan kembali mendekati tingkat sebelum pandemi dengan angka 9,36%,

mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di tengah pemulihan ekonomi yang berlanjut.

Penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor struktural masih menjadi penghalang dalam menekan angka kemiskinan, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu isu ekonomi yang krusial di Indonesia, mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan. Fenomena ini tidak hanya menghambat roda pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan politik (Kuswiyati & Utomo, 2022) dan (Hamzah et al., 2024). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi ini dalam menganalisis grafik tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk tren yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap perekonomian nasional. Grafik ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola tenaga kerja

dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Berikut grafik tingkat pengangguran di Indonesia selama 5 tahun terakhir.



Sumber: World Bank, data diolah kembali (2025)

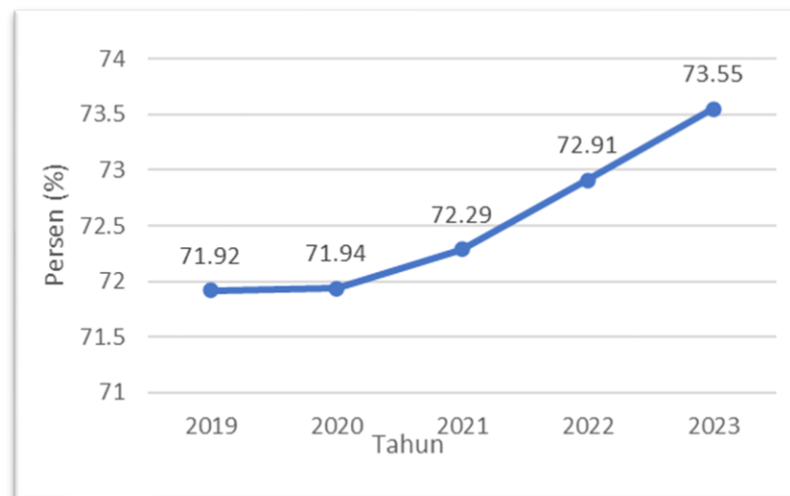
Gambar 1.3

Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2019-2023 (%)

Dari grafik diatas tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan dampak kondisi ekonomi. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran berada pada angka 5,2%, kemudian melonjak tajam menjadi 7,1% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan mengurangi peluang kerja. Selanjutnya, tingkat pengangguran berangsur menurun menjadi 6,5% pada tahun 2021 dan 5,9% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran kembali menurun ke angka 5,3%, mendekati tingkat sebelum pandemi, yang menunjukkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga menjadikan negara ini menarik untuk diteliti, dalam memahami dinamika yang memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengangguran (Sari & Putri, 2022). Permasalahan pengangguran

merupakan isu yang membutuhkan penanganan khusus karena berpengaruh signifikan terhadap perekonomian suatu negara (Suharlina, 2020).

Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya menciptakan tantangan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, yang merupakan variabel independen yang krusial dalam analisis pembangunan. Kemiskinan yang meluas dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri berfungsi sebagai indikator untuk menilai kemajuan suatu negara dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Selama periode 2000-2023, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Ricardo Parera, 2022). Hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan cukup kompleks. Di satu sisi, peningkatan IPM dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak meningkat (Sandra Dwita Sari, 2022). Namun, di sisi lain, tingginya IPM juga dapat menciptakan kesenjangan antara harapan pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Berikut ini grafik indeks pembangunan manusia di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah kembali, 2025

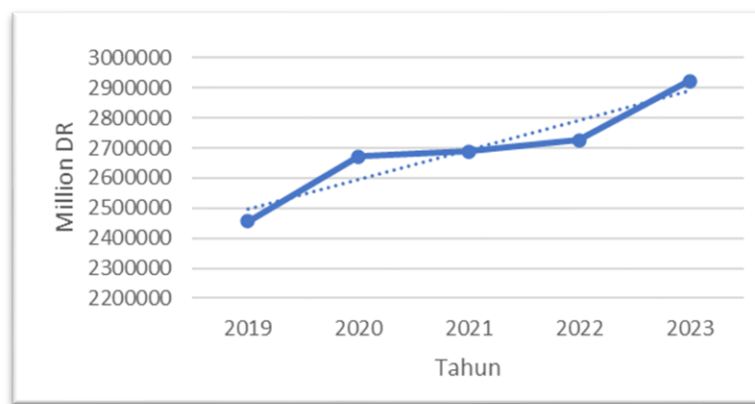
Gambar 1.4

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2019-2023 (%)

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia mengalami peningkatan stabil selama periode 2019-2023, dari 71,92% pada 2019 menjadi 73,55% pada 2023. Tren kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti akses pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,4–0,6 poin per tahun, perkembangan ini menunjukkan langkah positif menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan IPM yang terlihat dalam grafik di atas juga berkaitan erat dengan variabel Upah Minimum Provinsi, yang berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Upah yang lebih tinggi berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Kebijakan upah minimum provinsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun juga dapat memberikan dampak yang beragam

terhadap pengangguran. Pada satu sisi, kenaikan upah minimum provinsi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Namun, pada sisi lain, kenaikan upah minimum yang tidak seimbang dengan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan, sehingga mendorong pengurangan tenaga kerja atau bahkan PHK. Berikut ini grafik upah minimum provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir.



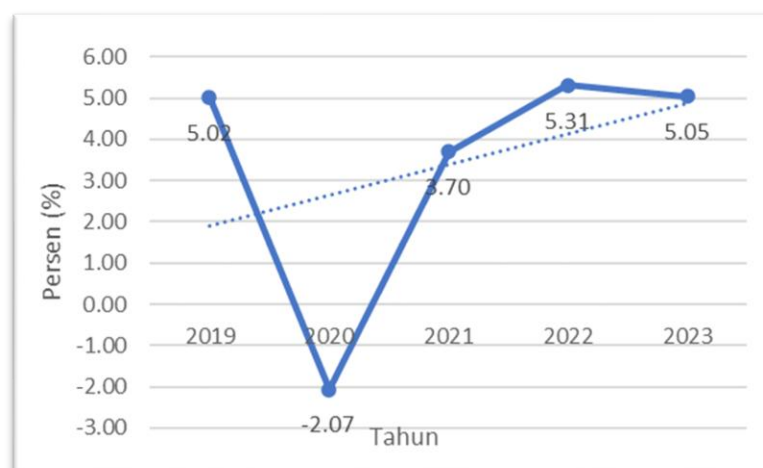
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah kembali, 2025

Gambar 1.5

**Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023
(Rupiah)**

Data diatas menunjukkan tren kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023, yang meningkat dari sekitar 2,4 juta rupiah pada 2019 menjadi hampir 3 juta rupiah pada 2023. Kenaikan yang relatif konsisten ini mencerminkan penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Meski begitu, kenaikan tidak selalu signifikan setiap tahun, seperti terlihat pada 2021 yang stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan upah minimum provinsi sejalan dengan kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi nasional (Mustika, 2024).

Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, tetapi juga oleh indikator ekonomi makro yang signifikan, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara, menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu (Subekti, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Amir, 2007). Ketika perekonomian tumbuh secara stabil, lapangan kerja baru tercipta, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2023 (%)

Berdasarkan grafik di atas, menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi berjumlah sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar -2,07% karena adanya kasus pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 sedikit lebih baik mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,70% hal ini memberikan gambaran adanya perekonomian yang cukup kuat, dimana masyarakat masih mampu bertahan di tengah terjadinya COVID-19 dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 5,31% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,04%. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan produksi dan investasi dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien, peningkatan pendapatan per kapita, serta akses yang lebih optimal terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Fenomena yang menarik pada penelitian, meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menurun selama lima tahun terakhir, negara ini masih menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN, mencerminkan tantangan struktural di pasar tenaga kerja. Di sisi lain, tren positif terlihat dari penurunan pengangguran, stabilnya indeks pembangunan manusia, kenaikan laju pertumbuhan ekonomi, lalu upah minimum provinsi yang cenderung terjaga dengan trend menurun. Namun, kenaikan upah minimum provinsi yang belum signifikan dibandingkan kebutuhan hidup layak menunjukkan perbaikan kualitas hidup yang belum merata. Hal ini

membuka peluang penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan berbagai faktor ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Hal baru dalam penelitian ini yaitu pengangguran berperan sebagai variabel *intervening* yang memediasi pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE), terhadap kemiskinan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hubungan ekonomi tersebut. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia Tahun 2000-2023.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, berikut identifikasi masalah yang peneliti cantumkan:

1. Bagaimana pengaruh langsung indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap pengangguran di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh langsung indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tidak langsung (mediasi) indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin peneliti capai, antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mengukur pengaruh langsung indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap pengangguran di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengukur pengaruh langsung indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengukur pengaruh tidak langsung (mediasi) indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Indonesia.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian adalah kontribusi yang dihasilkan dari sebuah penelitian, baik kegunaan/manfaat teoretis maupun kegunaan/manfaat praktis hasil

penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan model PLS-SEM (*Partial Least Square - Structural Equation Modeling*) untuk menganalisis topik yang diteliti dengan melibatkan satu variabel *intervening* dalam satu model. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel *intervening*. Diharapkan, penggunaan model penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan referensi model analisis yang baru dan memperkuat landasan teoretis untuk merumuskan strategi ekonomi makro yang efektif. Strategi ini penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui kebijakan yang mengintegrasikan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan daya beli masyarakat selama periode 2000-2023.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pengelolaan indeks pembangunan manusia (IPM), upah

minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan memperhatikan peran pengangguran sebagai variabel *intervening*.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel *intervening* serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan terkait kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

c) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel *intervening* di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di satu negara yaitu Indonesia, melalui pengambilan data sekunder dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), *World Bank* dan sumber relevan lainnya yang menyajikan data valid mengenai variabel yang digunakan peneliti di Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak keluarnya Surat Keputusan, yang diawali dengan pengajuan judul. Adapun pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif oleh penulis dan selanjutnya bimbingan dengan dosen pembimbing, pengumpulan data, kemudian pengajuan seminar usulan penelitian kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Berikut jadwal penelitian ini.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2024/2025																											
		Nov				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Penulisan BAB I, II, dan III																												
3.	Bimbingan & Revisi																												
4.	Seminar Usulan Penelitian																												
5.	Revisi Usulan Penelitian																												
6.	Penyusunan Skripsi																												
7.	Bimbingan & Revisi Skripsi																												
8.	Sidang Skripsi																												
9.	Revisi Skripsi																												